

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAMPUNG BANTAR DI KECAMATAN PAAL MERAH KOTA JAMBI

Harsens Nursa Prabawa<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri

<sup>2</sup>Corresponding author: harsensnursa@gmail.com

## ABSTRACT

*This article is based on research aimed at finding out the implementation of the BANTAR Village policy. The method used in this study is the Qualitative Research method. This study uses data collection techniques through interviews, observation, and documentation. From the results of the discussion showed that the implementation of the BANTAR Village program policy in Paal Merah District has not been running optimally. This can be proven by the fact that there are still RTs that have not yet joined the program. From the theory used by the writer, the constraints obtained are the difficulty in coordinating with each agency, the lack of accompanying scholars, and the lack of budget to participate in these activities and the lack of involvement of a third party to help the community run the BANTAR Village program. To overcome these problems, the authors suggest the need to make a budget for RTs that follow the program, the need for socialization, conduct training for counterpart scholars, the need for CSR from companies in the BANTAR village area and reduce the agencies involved in the program.*

*Keywords: Public Policy, Policy Implementation, Kampung BANTAR*

## ABSTRAK

Artikel ini berdasarkan penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Kampung BANTAR. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program Kampung BANTAR di Kecamatan Paal Merah belum berjalan maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya Rukun Tetangga yang belum mengikuti program ini. Dari teori yang digunakan oleh penulis adapun kendala yang didapatkan yaitu sulitnya koordinasi ke setiap instansi, kurangnya jumlah sarjana pendamping, dan kurangnya anggaran untuk mengikuti kegiatan tersebut serta belum adanya keterlibatan pihak ketiga untuk membantu masyarakat menjalankan program Kampung BANTAR. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis menyarankan perlunya membuat anggaran untuk RT yang mengikuti program tersebut, perlu adanya sosialisasi, mengadakan pelatihan kepada sarjana pendamping, perlu adanya CSR dari perusahaan yang ada di wilayah Kampung BANTAR tersebut dan mengurangi instansi yang terlibat dalam program tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Kampung BANTAR

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disusun dengan merujuk pada landasan filosofis Pancasila. Desentralisasi harus dilakukan dengan memperhatikan nilai Pancasila yang diharapkan mampu memperkuat rasa persatuan bangsa di setiap daerah bukan menjadikan konflik yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa Indonesia.

Di dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi daerah yang seluas luasnya kepada daerah mengakibatkan munculnya paradigma daya saing daerah dimana para kepala daerah berlomba lomba untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara kepemimpinan yang berbeda beda

sesuai dengan khas dari daerah tersebut. Penggunaan paradigma daya saing daerah dipengaruhi oleh aliran *New Public Management (NPM)* yaitu penerapan mode “*In Search of Excellence*”. Model ini memiliki ciri: 1) Penekanan pada pengembangan organisasi dan pembelajaran; 2) Mengelola perubahan budaya. Melalui model ini, setiap organisasi di tuntut untuk memiliki visi dan misi yang unggul, terdepan di banding lainnya. Artinya setiap daerah harus memiliki daya saing daerah.

Oleh karena itu pemerintah Kota Jambi memiliki visi dan misi, visi kota Jambi yaitu “Menjadikan kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat berakhlak dan berbudaya dengan mengedepankan pelayanan prima”. Adapun misi kota Jambi yaitu: 1) Penguatan birokrasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi; 2) Penguatan penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kenyamanan masyarakat; 3) Penguatan pengelolaan infrastruktur dan masyarakat; 4) Penguatan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan serta penataan lingkungan; 5) Penguatan kapasitas ekonomi perkotaan.

Dalam mewujudkan visi dan misi, Walikota Kota Jambi membuat suatu inovasi. Inovasi yang di terapkan oleh beliau ialah Kampung Bantar yang berarti Kampung Bersih, Aman dan Pintar. Program KAMPUNG BANTAR (Bersih, Aman, dan Pintar) merupakan program inisiatif pemerintah kota Jambi untuk mempercepat pembangunan agar tidak terjadi ketimpangan, kemudian meningkatkan kualitas kesejahteraan

perekonomian masyarakat khususnya RT Kampung BANTAR.

Adapun tujuan Program Kampung BANTAR untuk menciptakan lingkungan dalam lingkup RT yang bersih dan sehat artinya masyarakat harus memiliki tingkat kesadaran dalam pemanfaatan lahan tidur dengan membuat sebuah ruang terbuka yang bebas dari polusi. Masyarakat harus memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan demi membentuk sanitasi lingkungan yang sehat dan baik serta memiliki jiwa sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kecamatan Paal Merah terletak di Kota Jambi, letak Kecamatan Paal Merah yang strategis menjadi daya tarik masyarakat untuk tinggal di sana dikarenakan berada di jalur lingkaran. Kecamatan Paal Merah memiliki luas wilayah 1.066 H yang mencakup 5 kelurahan yaitu Talang Bakung, Lingkaran Selatan, Paal Merah, Eka Jaya dan Payo Selincih dengan jumlah penduduk sebesar 91.112 jiwa yang terdiri dari 45.246 Laki-laki dan 45.866 Perempuan. Kecamatan Paal Merah telah mengikuti program kampung BANTAR dari 2016. Dari 236 RT yang ada di Kecamatan Paal Merah. Pada tahun 2016 hanya 12 RT saja yang mengikuti dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 18 RT. Namun dalam pelaksanaan masih memiliki kendala salah satunya lingkungan yang belum bersih sebagaimana tujuan dari program tersebut.

Lingkungan yang belum bersih dapat mengakibatkan terjadinya banjir. Intensitas hujan yang tinggi pada saat musim hujan menyebabkan terjadinya

banjir di beberapa titik di Kota Jambi termasuk di perumahan Grand LA City di kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah RT 56 tergenang air hingga 8 jam. Salah satunya disebabkan oleh aliran drainase yang kurang lancar sehingga terjadi genangan air yang dapat menyebabkan bagi masyarakat setempat. Untuk mengatasinya harus dibutuhkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Budaya yang sering kita gunakan di Indonesia yaitu budaya gotong royong, apabila budaya ini dilaksanakan dapat dipastikan lingkungan akan menjadi bersih. Oleh karena itu, Walikota Kota Jambi berharap dengan adanya program Kampung Bantar ini dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di Kota Jambi khususnya terkait dengan lingkungan. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Implementasi Kebijakan Kampung Bantar Di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi .

## KAJIAN TEORI

Kajian teoritis dapat diartikan sebagai kajian yang berdasarkan atas pemikiran teori-teori dari para ahli, penelitian-penelitian, jurnal-jurnal, literatur-literatur yang ada, dan digunakan sebagai dasar dalam mengartikan suatu istilah.

Menurut Hasibuan (2019) kebijakan merupakan proses pengambilan keputusan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Kebijakan Publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan

publik, bukan kehidupan orang per orang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua domain lembaga administrator publik dan dikatakan atau disebut sebagai kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya.

Menurut Dye dalam Dunn (2003) Kebijakan publik memiliki makna luas seperti pendapat dari Dye yang mengatakan kebijakan publik sebagai *“Whatever governments choose to do or not to do”*, yang artinya apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki hak dan kewenangan dalam mengatur kebijakan tersebut.

Dalam mempraktikkan implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach dalam Agustino (2012:139), yaitu:

“cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang

termasuk mereka anggap klien.”

Menurut Agustino (2012:140) teori Grindle adalah teori yang mengukur keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat dilakukan dengan melihat hasil dari kebijakan tersebut sesuai dengan rencana sebelumnya atau tidak. Selain itu, juga dapat dilihat dari proses kebijakan tersebut yang akan menimbulkan dampak positif atau negatif terhadap masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori ini sebagai alat ukur untuk melihat keberhasilan implementasi program Kampung BANTAR di Kota Jambi.

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Grindle dapat dilihat dari dua sisi (Agustino, 2012 ) yaitu:

#### **Isi Kebijakan yang mencakup:**

- a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi. Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
- b. Tipe manfaat. Dalam kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
- c. Derajat perubahan yang ingin dicapai. Bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
- d. Letak pengambilan keputusan. Hal ini dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan

- yang akan diimplementasikan.
- e. Pelaksanaan program. Dalam menjalankan program harus didukung oleh pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.
  - f. Sumber daya yang digunakan. Suatu kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

**Konteks Implementasi yang mencakup:**

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa. Lingkungan dimana kebijakan tersebut dilaksanakan berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan.
- c. Kepatuhan dan respon dari pelaksana. Salah satu unsur penting dalam keberhasilan suatu kebijakan ialah kepatuhan dan respon dari pelaksana

**METODE**

Penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dan logika berpikir induktif. Metode ini dianggap cocok untuk meneliti, sudah seberapa besar dampak program Kampung BANTAR Bagi masyarakat

dengan melakukan pengamatan dan ucapan atau tulisan dari masyarakat tersebut. Adapun 3 teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara, observasi dan dokumentasi.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2012: 186). Dengan ini kita bisa mengetahui pelaksanaan program Kampung BANTAR di Kota Jambi. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara dengan menanyakan kepada narasumber kemudian mencatat apa yang disampaikan dan merekam apa yang disampaikan. Secara umum wawancara dibedakan menjadi tiga yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan tak terstruktur. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara semi struktur. Wawancara semi struktur merupakan wawancara yang menggabungkan antara wawancara terstruktur yang berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan peneliti dan pertanyaan yang lebih luas dan mendalam tanpa mengabaikan pedoman yang sudah ada (Sugiyono,2014). Oleh karena itu, peneliti dapat bebas bertanya kepada informan tetapi tetap dengan pedoman serta pertanyaan yang telah disiapkan mengenai implementasi kebijakan program Kampung BANTAR serta dampaknya terhadap masyarakat.

Observasi ialah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Menurut Sutrisno dalam Basrowi dan Suwandi (2008:94), observasi

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Oleh karena itu, peneliti telah mengamati bagaimana implementasi kebijakan program Kampung BANTAR di Paal Merah Kota Jambi serta berdampak positif bagi masyarakat atau tidak sehingga peneliti mengetahui apakah program kampung BANTAR ini mampu mewujudkan kampung yang bersih, aman, dan pintar khususnya dalam kebersihan apakah mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pembangunan berwawasan lingkungan dengan membangun tanpa merusak lingkungan sekitar.

Selain wawancara dan observasi, data dapat di peroleh melalui *library research* yaitu studi dokumentasi. Dokumentasi menurut Sugiyono dokumentasi adalah “Catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Kampung BANTAR menjadi solusi guna menumbuhkan semangat gotong royong masyarakat khususnya di masyarakat perkotaan Selain itu juga kebijakan program kampung BANTAR diharapkan mampu menimbulkan rasa memiliki yang kuat akan hasil pembangunan yang wajib di jaga masyarakat tidak seperti biasanya pemerintah yang mengerjakan tapi dengan adanya kebijakan ini masyarakat turut serta dalam membangun sedangkan pemerintah hanya memfasilitasi karena

prinsip dari program ini ialah dari masyarakat untuk masyarakat.

Program Kampung BANTAR adalah salah satu upaya untuk menciptakan kampung yang Bersih, aman dan Pintar. Indikator kampung yang bersih dapat dilihat dari beberapa hal seperti lingkungan yang bersih, prasarana lingkungan yang memadai, pemukiman tertata rapi, terhindar dari bencana seperti banjir, longsor dan lain-lain kemudian kampung aman yang dimaksud ialah kampung yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi, rendahnya angka kriminalitas dan tidak adanya Narkotika yang ada di kampung tersebut kemudian Kampung pintar yang dimaksud ialah kampung yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi seperti adanya fasilitas penunjang pendidikan seperti perpustakaan kampung dan lain-lain kemudian masyarakat diharapkan memiliki inovasi serta dapat meningkatkan perekonomian kampung. Apabila semua aspek ini terpenuhi akan membentuk kampung yang ideal untuk masyarakat yang tinggal. (Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Jambi, 2018)

Sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2019 (Peraturan Walikota Jambi 2019) tentang Petunjuk Teknis Penataan Kampung Bersih Aman dan Pintar program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kemudian saling berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Adapun pelaksanaannya DPMPA akan membentuk tim pembina dan tim penilaian. Pembinaan sendiri dilakukan pada bulan April hingga bulan Agustus. Setiap kecamatan akan mengutus

kampung yang dapat mengikuti program ini. Penilaian Kampung BANTAR sendiri dilakukan oleh tim penilai dari semua sektor berdasarkan indikator yang ada.

Terdapat 3 kategori Kampung BANTAR yaitu Kampung BANTAR kategori besar, sedang dan kecil. Hal ini dikategorikan berdasarkan jumlah penduduk. Hasil Rekapitulasi dari tim penilai dirapatkan kemudian hasilnya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Jambi dan akan mendapat hadiah ketika perayaan 17 Agustus di setiap tahunnya.

Kampung BANTAR dengan nilai tertinggi mendapatkan hadiah atau uang tunai dari Walikota Jambi dengan kriteria sebagai berikut (Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Jambi, 2018):

1. RT dengan kategori besar ialah RT yang berjumlah > 100 KK akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 10.000.000,-
2. RT dengan kategori sedang ialah RT yang berjumlah > 60 – 99 KK akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 7.000.000,-
3. RT dengan kategori kecil ialah RT yang berjumlah > 30 – 59 KK akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 5.000.000,-

Berdasarkan laporan yang peneliti terima dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak program Kampung BANTAR pertama kali dilakukan pada tahun 2014 dan rutin dilaksanakan setiap tahun, realisasi jumlah RT se-Kota Jambi yang telah menjadi Kampung BANTAR berjumlah 502 RT atau baru mencapai

30,93%. Selama lima tahun berjalan telah mengalami peningkatan jumlah kampung yang memenangkan Kampung BANTAR tetapi pada tahun 2015-2016 terjadi penurunan jumlah kampung yang memenangkan Kampung BANTAR.

## 1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

### 1.1 *Kepentingan yang Dipengaruhi*

Suatu keberhasilan dari kebijakan tersebut dapat dilihat dari dampak positif yang diterima masyarakat dengan adanya kebijakan tersebut. Masyarakat menjadi kelompok sasaran yang menentukan suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil atau tidak.

Dalam hal ini masyarakat Kota Jambi menjadi sasaran utama dari program Kampung BANTAR. Pemerintah membuat suatu program yang memiliki semboyan dari masyarakat dan untuk masyarakat. Program ini berasal dari swadaya masyarakat dan dampak positif yang akan diterima masyarakat dengan adanya program ini. Pemerintah hanya memfasilitasi serta mengajak masyarakat untuk mengikuti program ini dengan memberikan *reward* kepada Kampung BANTAR yang berhasil memenangkan perlombaan ini.

Berdasarkan wawancara peneliti, masyarakat serta pemerintah berharap dengan adanya program ini mampu memperbaiki permasalahan yang ada di kampung seperti masalah kebersihan, keamanan, dan kualitas sumber daya manusia. Harapannya, dengan adanya program ini sebelumnya kampung yang kumuh namun diharapkan setelah adanya program ini kampung menjadi bersih, asri, indah. Kemudian masyarakat sadar

terhadap lingkungan serta kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan semangat gotong royong kembali lagi yang mana selama ini masyarakat perkotaan cenderung acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar.

### **1.2 Jenis Manfaat Kebijakan**

Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pasti memiliki nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dengan adanya kebijakan tersebut.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan bahwa dengan adanya program Kampung BANTAR di Kecamatan Paal Merah telah memberikan dampak positif berupa perubahan lingkungan yang lebih baik seperti pekarangan rumah yang lebih rapi serta menumbuhkan kembali semangat gotong royong. Namun di sisi lain, Program ini belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

### **1.3 Derajat Perubahan yang Diinginkan**

Kampung Bantar merupakan salah satu inovasi dari Walikota Jambi untuk mengubah sebuah lingkungan menjadi berwawasan baik dalam kebersihan, keamanan dan perekonomian. Dengan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, fasilitas sanitasi lingkungan yang cukup memadai, membangun pemukiman layak huni, aman dan tertib serta meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan wawancara dan

pengamatan peneliti dengan adanya program ini menciptakan perubahan yang signifikan dari segi kebersihan lingkungan, keamanan, dan pintar. Segi kebersihan lingkungan masyarakat telah memiliki kesadaran yang tinggi terkait kebersihan kemudian semenjak kampung tersebut menjadi kampung BANTAR keadaan kampung menjadi aman karena jaga malam telah diterapkan dengan baik (Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Jambi, 2018).

### **1.4 Letak Pengambilan Keputusan**

Dalam suatu keputusan adanya perencanaan yang telah dilakukan secara matang. Kedudukan pengambil keputusan akan menentukan dimana aktivitas implementasi program Kampung BANTAR. Program ini merupakan inovasi dari bapak Walikota Jambi untuk menciptakan lingkungan yang bersih terhindar dari sampah, masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, meningkatkan keamanan, sejahtera dan bahagia bagi keluarga dan kehidupan masyarakat. Selain itu juga diharapkan adanya program ini mampu menumbuhkan semangat gotong royong yang kian memudar di masyarakat perkotaan di sebabkan oleh kesibukan kerja. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi bertanggung jawab atas pelaksanaan program Kampung Bantar dengan membentuk tim pembina Kampung BANTAR yang bertujuan untuk memberikan penilaian dan pengawasan terhadap RT yang mengikuti Kampung BANTAR di Kota Jambi kemudian RT yang mengikuti akan dilakukan penilaian.

### 1.5 Pelaksana Program

Kebijakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan apabila memiliki pelaksana kebijakan yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Dibutuhkan pembinaan terhadap pelaksana kebijakan agar para pelaksana memiliki kemampuan dalam suatu tugas. Hal ini harus dibuat secara baik dan terperinci siapa saja yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Kemudian, dibutuhkan kerjasama dari semua lini baik vertikal dan horizontal secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2019 (Peraturan Walikota Jambi 2019) tentang Pembinaan Kampung BANTAR pasal (7) dan pasal (8) yang berisi tentang pembinaan dan penilaian dilakukan oleh tim. Tim itu sendiri terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi, Polresta Jambi, Dinas Pendidikan, Tim Penggerak PKK, Kodim 0415 Batang hari, dan Instansi / pihak yang terkait.

Namun berdasarkan wawancara peneliti dengan masyarakat sebagian besar hanya peran Camat, Lurah, dan ketua RT saja yang melakukan pembinaan kepada masyarakat seperti mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan program kampung BANTAR ini sedangkan instansi yang telah ditetapkan sebagai tim pembina hanya sekedar saja sebagai tim penilai saja bukan sebagai tim pembina sehingga keberlanjutan program ini tidak ada. Banyak kampung

yang telah dinobatkan sebagai kampung BANTAR namun dikarenakan tidak ada pembinaan dari tim pembina sehingga program ini hanya sekedar saja.

### 1.6 Sumber Daya yang Dilibatkan

Dalam mewujudkan program Kampung BANTAR dibutuhkan sumber daya. Dalam penelitian ini sumber daya yang terlibat dalam program ini antara lain: sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Ketiga sumber daya ini saling terlibat dalam terlaksananya program Kampung BANTAR ini. Ketiganya saling berkaitan guna menunjang pelaksanaan Kampung BANTAR agar tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

*Pertama*, sumber daya manusia yang mana berperan dalam tercapainya pelaksanaan kebijakan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pegawai yang berkompeten sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam hal ini untuk mencapai kebijakan selain memiliki kemampuan yang handal tetapi juga memiliki daya juang berintegritas untuk melaksanakan kebijakan. Dalam hal ini Walikota Jambi memerintahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Anak untuk melaksanakan program Kampung BANTAR. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Anak menunjuk 1 orang sarjana pendamping untuk mendampingi di wilayah masing-masing.

*Kedua*, adalah anggaran yang mana suatu kebijakan yang dibuat tidak terlepas dari dana dibutuhkan dana

untuk menunjang kegiatan tersebut. Secara umum dana itu adalah uang. Uang guna mendukung terlaksananya Program Kampung BANTAR itu sendiri berasal dari swadaya masyarakat. Ketiga adalah sarana dan prasarana program ini menyesuaikan dengan apa yang telah ada di kampung seperti jalan, air bersih, Poskamling dan lain-lain.

## 2. Konteks Implementasi

### 2.1 *Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Dilibatkan*

Suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila memperhatikan beberapa hal antara lain kekuasaan, kepentingan dan strategi yang digunakan oleh para aktor pelaksana program tersebut. Hal ini perlu diperhatikan apabila hal ini tidak di perhatikan maka keberhasilan program tersebut tidak akan tercapai.

Kebijakan Kampung BANTAR dilimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Anak dan Perempuan Kota Jambi, oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Anak dan Perempuan Kota Jambi harus memiliki strategi agar program ini dapat terwujud salah satu strategi yang telah dilakukan ialah membentuk tim pembinaan. Namun dalam pelaksanaan tim pembina belum melaksanakan tugasnya secara maksimal.

### 2.2 *Karakteristik Lembaga dan Penguasa*

Dalam perumusan suatu kebijakan ada peran dari para pihak yang terkait dalam menetapkan suatu kebijakan sama halnya dengan kebijakan Kampung BANTAR. Namun dari perumusannya

program Kampung BANTAR didominasi oleh pihak pemerintah. Dilihat dari sisi politik dengan adanya program ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mempertahankan kekuasaan terutama menjelang pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan wawancara dari berbagai pihak bahwa kebijakan Kampung BANTAR bukan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan maupun memperoleh kekuasaan melainkan ini merupakan ide kreatif dari Walikota Jambi untuk membangun Kota Jambi.

### 2.3 *Kepatuhan dan Daya Tanggap*

Dalam menetapkan suatu kebijakan pasti memperoleh respon yang berbeda beda dari masyarakat. Di era Globalisasi masyarakat semakin cerdas untuk menanggapi permasalahan yang ada terutama sektor pemerintahan. Jadi telah sewajarnya masyarakat memiliki tanggapan yang berbeda-beda ada yang mendukung dengan adanya kebijakan tersebut tetapi ada pula respon masyarakat yang tidak mendukung dengan adanya kebijakan tersebut.

Berdasarkan wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap program ini di Kecamatan Paal Merah semakin membaik namun hanya beberapa kelurahan saja yang memiliki perkembangan yang pesat seperti Eka Jaya. Hal ini dikarenakan beberapa RT yang belum siap untuk mengikuti program ini dengan alasan belum ada biaya, Ketua RT yang kurang memahami program ini, serta kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan masyarakat yang sibuk bekerja sehingga

cenderung tidak peduli di lingkungan sekitar rumah.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian analisis dari teori yang digunakan dalam penelitian maka pelaksanaan program Kampung Bersih Aman dan Pintar (BANTAR) di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi belum berjalan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan belum keseluruhan RT yang ada di Kecamatan Paal Merah mengikuti program Kampung BANTAR. Kendala dalam sumber daya meliputi kurangnya jumlah sarjana pendamping yang menyebabkan sosialisasi kurang berjalan dengan baik. Kendala yang kedua ialah kurangnya dana untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kebijakan ini sendiri bukan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan maupun memperoleh kekuasaan melainkan ide dari Walikota Kota Jambi. Para aktor pelaksana terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Anak Kota Jambi, Sarjana pendamping, Kecamatan dan kelurahan. Tim pembina telah berupaya melaksanakan pembinaan berupa sosialisasi kepada masyarakat tetapi di dalam pelaksanaan sarjana pendamping selaku tim pembina sendiri belum melaksanakan sosialisasi dengan baik karena belum dibekali ilmu tentang program kampung BANTAR itu sendiri. Tetapi di sisi lain, partisipasi masyarakat terhadap program ini di Kecamatan Paal Merah semakin membaik dari tahun ke tahun walaupun hanya beberapa kelurahan saja yang memiliki perkembangan yang pesat.

Beberapa hal yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Jambi untuk mengatasi permasalahan kebijakan program Kampung BANTAR di Kecamatan Paal Merah antara lain:

1. Mengurangi instansi yang terlibat dalam tim pembina dan penilai sehingga koordinasi dipermudah dan program berjalan maksimal karena hanya satu instansi yang terlibat.
2. Perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media televisi lokal pemerintah Kota Jambi, website Pemerintah Kota Jambi, surat kabar, menempelkan pamflet atau spanduk. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program Kampung BANTAR sehingga program ini dapat berjalan secara efektif.
3. Mengadakan pelatihan mengenai program Kampung BANTAR kepada sarjana pendamping. Dimaksudkan agar tiap-tiap sarjana pendamping mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Ditambahnya jumlah sarjana pendamping di tiap kecamatan karena jumlah RT yang ada di Kota Jambi banyak sehingga dapat memaksimalkan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat tentang program Kampung BANTAR.
5. Perlu adanya CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) dari perusahaan-perusahaan di wilayah Kampung

BANTAR dengan bekerjasama dalam mendukung keberhasilan program Kampung BANTAR dengan cara memberikan dana atau membuat kerjasama kepada pemerintah agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Basrowi, S. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Jambi. 2018. *Kampung BANTAR*. (Online). Tersedia di <https://jambikota.go.id/new/kampung-bantar> di unduh pada 18 Oktober 2019.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi. 2019. *Laporan Kegiatan Kampung BANTAR*. Pemerintah Kota Jambi: DPMPA.
- Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasibuan, A. S. 2019. Peranan Ekologi Pemerintahan dalam Meningkatkan Daya Saing Kebijakan Pemerintah Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 33-47.
- Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nani. 2015. *Walikota Pelopor Kampung BANTAR*. (Online). Tersedia di <http://jambi.tribunnews.com> diunduh pada 18 Oktober 2019.
- Rohmayana. 2018. *8 Jam Banjir Setinggi Lutut Rendam RT 56 Paal Merah Ijazah dan Surat Berharga Ikut Terendam*. (Online). Tersedia di <http://jambi.tribunnews.com>, di unduh pada 23 Oktober 2019.
- Sirajuddin, I. A. 2014. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 4 (1): 3.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.